

Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hajering

Dosen Prodi Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak badan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Makassar sebanyak 2.046 ribu orang. Jumlah populasi relatif besar (2.046 orang), maka penarikan sampel dengan menggunakan rumus slovin sehingga didapat 100 responden. Adapun teknik analisis data yang dipakai adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kinerja account representative memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kinerja account representative, maka kepatuhan wajib pajaknya akan semakin meningkat. Penerapan e-system memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan e-system, maka kepatuhan wajib pajaknya akan semakin meningkat. Variabel yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan adalah kinerja account representative memiliki nilai standard coeficient beta 0,759.

Kata Kunci: Kinerja Account Representative, Penerapan E-System, Dan Wajib Pajak Badan

Copyright (c) 2023 Hajering

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan kas negara, di mana pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat untuk kas negara yang sifatnya memaksa tanpa ada imbalan secara langsung, dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri.Sumber penerimaan pendapatan suatu negara berpotensi besar yaitu negara indonesia dimana rata-rata lebih dari 70% dari keseluruhan pendapatan negara dalam berbagai fungsi kenegaraan berasal dari pajak (Salim & Safitri, 2013). Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi.

Norman D.Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.Sehingga terus dilakukan perubahan untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak. Oleh karena itu, perlu diadakan reformasi perpajakan di Indonesia. Reformasi administrasi pajak dalam dunia perpajakan sangat diperlukan agar penyampaian

pajak dapat meningkat dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari awal berdiri sampai saat ini DJP telah beberapa kali menjalankan agenda perubahan. Perubahan pertama yang cukup besar terjadi pada tahun 1983 di mana beberapa Undang-undang baru dibidang perpajakan disahkan untuk mengganti Undang-undang lama peninggalan Belanda. Sistem pemungutan pajak diubah dari Official Assessment menjadi Self Assessment. Mardiasmo (2011:7) mengatakan Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2012 Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk menerapkan sistem perpajakan modern dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Penerapan sistem tersebut mencakup aspek-aspek perubahan struktur organisasi dan sistem ke kantor pelayanan pajak, perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu bentuk perubahan struktur organisasi tersebut adalah dengan diberlakukannya Account Representative (AR) pajak. Sistem administrasi perpajakan pada KPP modern diharapkan lebih baik daripada KPP konvensional, diantaranya dengan adanya perbaikan pelayanan melalui pembentukan Account Representative (AR) untuk menampung keberatan WP. Account Representative (AR) pajak adalah aparat pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan sistem administrasi modern dan bertugas untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan pengarahan secara langsung kepada sejumlah wajib pajak tertentu yang telah ditugaskan kepada Account Representative (AR) tersebut. Setiap Account Representative (AR) pajak melayani beberapa wajib pajak yang harus diawasi dan diarahkan. Penugasan Account Representative (AR) pajak dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja serta profesionalisme karena pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus.

Sistem administrasi perpajakan modern yang juga menerapkan atau mengimplementasikan kemajuan teknologi informasi melalui pelayanan perpajakan menggunakan sistem online yang dinamakan e-system yaitu berupa, e-faktur, e-SPT, e-filing, e-billing diharapkan dapat meningkatkan control yang efektif. Sistemnya yaitu e-faktur mulai berlaku pada 1 Juli 2014 yang memudahkan wajib pajak dengan menerbitkan faktur pajak melalui system elektronik, e-SPT dengan penyampaian SPT secara online dengan program yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, e-filing mulai berlaku pada 1 April 2018 dan e-billing pada 1 Januari 2016 yang berguna untuk melaporkan surat pemberitahuan serta pembayaran pajak secara elektronik.

Fasmi dan Misra (2013) konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Modernisasi perpajakan dapat berupa penyempurnaan kebijakan perpajakan dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pemerintah berupaya memperbaiki sistem administrasi perpajakan dengan menetapkan adanya sistem administrasi perpajakan modern agar pemungutan pajak lebih sempurna dan dapat mengoptimalkan pajak sebagai sumber penerimaan Negara.

Rahayu dan Lingga (2012) program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan account representative dan complaint center untuk

menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan berbasis e-system seperti e-Faktur, e-SPT, e-Filing, e-Billing, e-Registration, dan e-Counseling. Dengan diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern, dapat meningkatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi berdampak pula pada meningkatnya jumlah penerimaan pajak. Sehingga dapat mengoptimalkan jumlah penerimaan APBN guna membantu pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yaitu pelayanan berbasis e-system dan penunjukan Account Representative, dengan tujuan dapat memberikan pelayanan yang baik guna meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Masalah yang dihadapi KPP bahwa Wajib Pajak sering mengalami kesulitan ketika akan masuk ke sistem administrasi elektronik (esystem) atau mengirimkan laporan pajaknya, sehingga Wajib Pajak harus menyampaikan secara manual ke KPP. Masalah lainnya adalah Wajib Pajak sudah membayar pajak, tetapi masih timbul kebingungan pada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu Wajib Pajak sering tidak menyampaikan SPT tepat waktu, SPT yang di sampaikan pun tidak semuanya sesuai dengan kebenaran. Terkadang SPT yang disampaikan wajib pajak tidak sesuai dengan kenyataannya (tidak akurat).

Berdasarkan latar belakang tersebut, modernisasi ini diharapkan sejalan dengan tingkat peningkatan kepatuhan dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri,

melaporkan dan menyetorkan pajak, dan kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak. maka permasalahan pokok yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah (1) Apakah e-system pada modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak? (2) Apakah kinerja Account Representative pada modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?. Maka dari hal penelitian ini akan meneliti tentang "Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan" di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

- H1: Modernisasi Kinerja Account Representative berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak Badan.
- H2: Modernisasi E-System berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

METODOLOGI

Menurut Margono (2004), Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Adanya populasi, dapat membantu mengetahui jumlah keseluruhan dari satuan - satuan individu - individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Madya Makassar. Untuk menjawab hipotesis penelitian, data akan dianalisis melalui beberapa tahapan pengujian seperti Analisis Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini, data akan dianalisis menggunakan metode analisis regresi berganda melalui uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Account Representative	100	3.25	5.00	4.4650	.44099
Penerapan E-System	100	4.00	5.00	4.5083	.31282
Kepatuhan Wajib Pajak	100	2.75	5.00	4.3225	.53217
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Tabel 8 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kinerja Account Representative (X1)

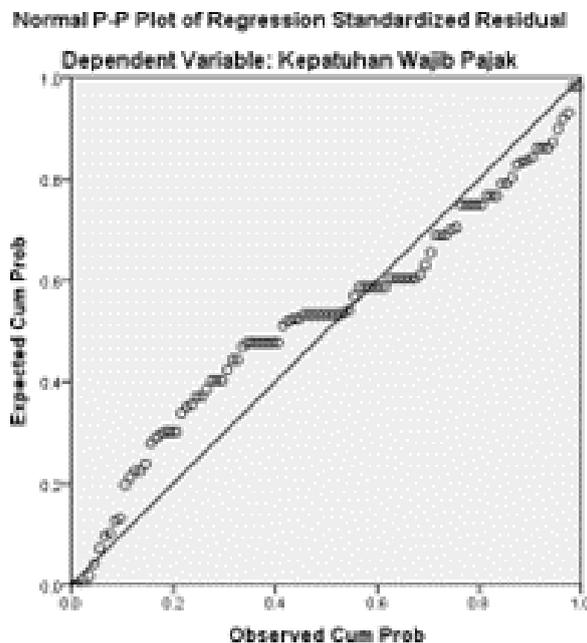
Berdasarkan tabel 8 diatas X1 memiliki nilai minimum 3,25, nilai maksimum 5, dan mean 4,4650 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,44099 dari nilai rata-rata jawaban responden.

2) Penerapan E-System (X2)

Berdasarkan tabel 8 diatas X2 memiliki nilai minimum 4, nilai maksimum 5, dan mean 4,5083 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,31282 dari nilai rata-rata jawaban responden.

3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 8 diatas Y memiliki nilai minimum 2,75, nilai maksimum 5, dan mean 4,3225 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,53217 dari nilai rata-rata jawaban responden.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

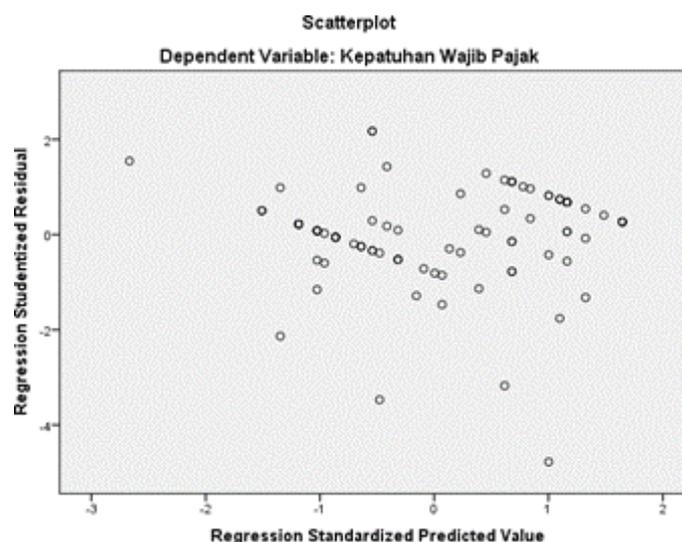
Berdasarkan gambar 1 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independennya, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. Untuk menguji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Faktor). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas (Sunjoyo,dkk., 2013). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kinerja Account Representative	.999	1.001
Penerapan E-System	.999	1.001

Pada Tabel 2 Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diatas menunjukkan terlihat bahwa variabel kinerja account representative dan penerapan e-system memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berari dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolonearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan

bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak dengan variabel yang mempengaruhi yaitu kinerja account representative dan penerapan e-system.

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.577	.736		-.784	.435
Kinerja Account Representative	.759	.093	.629	8.164	.000
Penerapan E-System	.335	.131	.197	2.556	.012

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = -0,577 + 0,759 X1 + 0,335 X2 + e$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) Nilai konstanta adalah -0,577 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (kinerja account representative dan penerapan e-system) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar -0,577 satuan.

b) Koefisien regresi kinerja account representative (b1) adalah 0,759 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,759 jika nilai variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kinerja account representative (X1) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin baik kinerja account representative, maka kepatuhan wajib pajaknya akan semakin meningkat.

c) Koefisien regresi penerapan e-system (b2) adalah 0,335 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,335 jika nilai variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel penerapan e-system (X2) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin baik penerapan e-system, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji-t) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients \		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.577	.736		-.784	.435

Kinerja Account Representative	.759	.093	.629	8.164	.000
Penerapan E-System	.335	.131	.197	2.556	.012

Sumber : Data olahan tahun 2022

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Kinerja Account Representative (X1) dan Penerapan E-System (X2) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 6. Hasil Uji Simultan ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	11.918	2	5.959	35.860	.000 ^b
Residual	16.119	97	.166		
Total	28.037	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Penerapan E-System, Kinerja Account Representative

Sumber : Data yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja account representative dan penerapan e-system secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7. Koefisien Determinasi - 1 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.652 ^a	.425	.413	.40765

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-System, Kinerja Account Representative

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 7 di atas terdapat angka R sebesar 0,652 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan kedua variabel independennya kuat, karena berada di defenisi kuat yang angkanya diantara 0,601 – 0,8. Sedangkan nilai R square sebesar 0,425 atau 42,5% ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kinerja account representative dan penerapan e-system sebesar 42,5% sedangkan sisanya 57,5% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini..

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda mengenai pengaruh kinerja account representative dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak badan, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kinerja Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Makassar Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kinerja account representative berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat

berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Petugas pajak (Account Representative) memberikan pelayanan yang baik, memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti, memperhatikan wajib pajak atas pajak yang dikenakan serta memberikan sarana tentang cara membayar dan melunasi pajak dengan mudah dan efisien. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas KPP Madya Makassar, maka wajib pajak semakin termotivasi dalam membayar pajak. dengan harapan mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas KPP Madya Makassar.

Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Modernisasi prosedur organisasi merupakan perubahan terkait proses penyempurnaan administrasi dalam pemberian layanan dan pemeriksaan yang disesuaikan dengan tuntutan undang-undang, masyarakat, serta biaya yang tersedia (Nasucha, 2004). Modernisasi ini ditandai dengan adanya pembentukan Account Representative dalam penyederhanaan prosedur administrasi memberikan pelayanan melalui pemberian himbuan/bimbingan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak. Dengan adanya fungsi pengawasan oleh petugas Account Representative diharapkan wajib pajak patuh dan tepat waktu dalam membayarkan pajaknya sehingga penerimaan disektor pajak bisa ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan teori TAM, yaitu niat seseorang dalam menggunakan teknologi dipengaruhi faktor persepsi kemanfaatan dimana wajib pajak percaya bahwa dengan menggunakan suatu sistem tersebut maka akan dapat meningkatkan kinerja account representative karena dengan adanya penggunaan teknologi informasi ini dapat memudahkan dalam pekerjaannya sehingga lebih efektif dan efisien. Dengan meningkatnya kinerja account representative maka dapat mempengaruhi setiap wajib pajak untuk lebih termotivasi dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Setiawan (2017) membuktikan bahwa kinerja AR berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan semakin patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya penerimaan pajak suatu negara akan menjadi lebih optimal.

2. Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Makassar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan E- system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Semakin tinggi penerapan E-system maka membuat kepatuhan wajib pajaknya semakin meningkat. Dengan adanya sistem e-filing dapat memudahkan dan mempercepat wajib pajak dalam penyampaian SPT karena wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan akan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan dikembangkannya pelaporan pajak terutang berbasis e-system seperti e-faktur, e-spt, e-filing dan e-billing yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih efektif (Widjaja & Siagian, 2017). Tujuan di perbaharuinya e-system perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti e-faktur yang memudahkan wajib pajak dengan menerbitkan faktur pajak melalui system elektronik, e-SPT dengan penyampaian SPT dengan program yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak, e-filing dan e-billing yang berguna untuk melaporkan surat pemberitahuan serta pembayaran pajak secara elektronik. Serta tujuan lainnya adalah untuk menghemat waktu, mudah, akurat dan tanpa kertas sehingga

menghasilkan pelayanan secara efisien dan efektif.. Sistem pajak online membuat dampak yang efektif pada ekonomi karena meningkatkan pendapatan negara serta meningkatnya kepatuhan pajak oleh Wajib Pajak. Ini karena kenyamanan, penghematan waktu, efektivitas biaya dari Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan teori TAM, yaitu niat seseorang dalam menggunakan teknologi dipengaruhi faktor persepsi kemudahan penggunaan teknologi diartikan di mana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut mudah dipahami dan mudah penggunaannya. Penggunaan e-system ini dikatakan efektif karena dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam sarana penyampaian, perhitungan, dan pembayaran pajak sehingga wajib pajak dapat merasakan manfaat yang diperoleh dari penggunaan e-system tersebut. Dengan adanya penerapan e-system ini maka dapat mempengaruhi setiap wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Assasiyatul Faisah (2018) yang menyatakan bahwa penerapan E-System perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Eko Witriyanto (2016) yang menyatakan bahwa E-system berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa kinerja account representative dan penerapan e-system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Madya Makassar. Responden penelitian ini berjumlah 100 orang Wajib Pajak pada wilayah Makassar. Berdasarkan data yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda telah dilakukan.

Referensi :

- Ahmad Faisal, R. S. (2016). Analisis kinerja keuangan. *K i n e r j a*.
- Amran, Z. B. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Industri Makanan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.
- Ang, R. (1997). Buku Pintar : Pasar Modal Indonesia. *Jakarta : Mediasoft Indonesia*.
- Anwari, K. (2018). Pengaruh Economic Value Added dan Market Value Added Terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Universitas Muslim Indonesia*.
- Christanty, M. (2009). Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Dan Economic Value Added (Eva) Terhadap Return Saham . *Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Dasri, U. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Return Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 - 2017. *Universitas Muslim Indonesia*.
- E, T. (2010). Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio Edisi Pertama Cetakan Pertama. *Yogyakarta, BPEF*.
- Eisenhardt, K.M. (1998). Agency Theory : An Assessment and Review. *Academy of Management Review, 57-74*.

- Fama. (1978). The Effect Of a Firm's Investment and Financing Decisions on the Welfare of Its Security Holders. . *The American Economic Review*, 272-284.
- Ghozali. (2012 : 110). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. *Edisi Keempat. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.*
- Hapsari, P. (2008). Analisis Pengaruh Eva Dan Roa Terhadap Return Saham Pada Industri Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia.
- Hariani, L. S. (2007). Analisis Pengaruh Economic Value Added (Eva) Dan Rasio Keuangan Terhadap Return Saham Syariah . *Jurnal Ekonomi Modernisasi.*
- Houston, B. d. (2006). Dasar - Dasar Manajemen Keuangan. *Alih Bahasa Ali Akbar Yulianto, Buku satu, Edisi Sepuluh, PT. Salemba Empat, Jakarta.*